

**X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan perpustakaan secara nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan perpustakaan.</p> <p>b. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan dan pengembangan sistem perpustakaan secara nasional.</p> <p>c. Penetapan kebijakan dan pengembangan jaringan perpustakaan secara nasional.</p> <p>d. Penetapan kebijakan dan pengembangan Sumber</p>	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>b. —</p> <p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan</p>	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten/kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>b. —</p> <p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>Daya Manusia (SDM) perpustakaan secara nasional.</p> <p>e. Penetapan kebijakan pembentukan dan pengembangan organisasi perpustakaan secara nasional.</p> <p>f. Penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan secara nasional.</p>	<p>SDM perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p>	<p>perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</p>
	<p>2. Pembinaan Teknis Perpustakaan</p>	<p>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan :</p> <p>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</p> <p>b. Pengembangan SDM.</p> <p>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</p> <p>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</p> <p>e. Pengembangan minat baca.</p>	<p>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah provinsi:</p> <p>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</p> <p>b. Pengembangan SDM.</p> <p>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</p> <p>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</p> <p>e. Pengembangan minat baca.</p>	<p>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten/kota :</p> <p>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</p> <p>b. Pengembangan SDM.</p> <p>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</p> <p>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</p> <p>e. Pengembangan minat baca.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi nasional.</li> <li>2. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi nasional.</li> <li>3. Koordinasi pelestarian tingkat nasional, regional, dan internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota.</li> <li>3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>2. —</li> <li>3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten/kota.</li> </ol>
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan secara nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan penilaian angka kredit pustakawan.</li> <li>3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan madya dan pustakawan utama.</li> <li>4. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. —</li> <li>3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</li> <li>4. —</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. —</li> <li>3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</li> <li>4. —</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian akreditasi perpustakaan.</li> <li>2. Pemberian sertifikasi pustakawan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi.</li> <li>2. Pemberian sertifikasi pustakawan di wilayah provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> <li>2. —</li> </ol>
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penetapan kurikulum dan modul diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</li> <li>2. Pemberian akreditasi diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</li> <li>3. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</li> <li>2. —</li> <li>3. —</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</li> <li>2. —</li> <li>3. —</li> </ol>